BAB 27

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik lndonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara lndonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dengan demikian, pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bangsa Indonesia. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah.

Kesungguhan Pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang baik kepada seluruh anak bangsa telah dilakukan

melalui berbagai kegiatan pembangunan bidang pendidikan yang meliputi perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Kesungguhan tersebut telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan seperti terlihat dalam membaiknya akses dan pemerataan pendidikan yang tercermin dari meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan, serta meningkatkan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas.

Dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat. Hal terpenting yang dilakukan pada tahun 2008 adalah melanjutkan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun. Penyediaan BOS ini ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Untuk jenjang pendidikan menengah disediakan bantuan operasional manajemen mutu yang ditujukan untuk membantu SMA/SMK/MA dalam menyediakan kebutuhan operasionalnya.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah juga dilakukan dengan melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang diprioritaskan untuk wilayah perdesaan dan wilayah terpencil. Untuk jenjang pendidikan tinggi upaya yang dilakukan antara lain adalah penambahan daya tampung perguruan tinggi dan pembukaan politeknik baru. Upaya peningkatan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin disediakan beasiswa bagi dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi yang dimaksudkan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin

mendapat peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang paling tinggi.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang juga terus ditingkatkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi akademik dan kesejahteraan pendidik sejalan dengan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, penyediaan fasilitas pendidikan berupa ruang laboratorium, perpustakaan, pusat sumber belajar, beserta peralatan peraga pendidikan. Pada tahun 2008 Pemerintah juga terus menyediakan BOS Buku, yaitu anggaran yang diberikan langsung kepada sekolah, khusus penyediaan buku mata pelajaran terutama mata pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. BOS Buku ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memberikan bantuan kepada sekolah untuk pengadaan buku teks pelajaran bagi seluruh siswa dan membantu masyarakat dengan meringankan beban biaya pendidikan. Pemerintah juga membeli hak cipta naskah sejumlah buku mata pelajaran dari para penulis buku pelajaran dan sebagian telah di-*up-load* di *website* Depdiknas dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) yang bebas diunduh dan dicetak oleh siapa pun. Ketersediaan buku elektronik ini diharapkan dapat pula membantu siswa dalam mengakses buku pelajaran secara gratis. Dengan ketersediaan buku yang semakin banyak dan mencakup beragam mata pelajaran, diharapkan kualitas proses belajar mengajar juga menjadi lebih baik.

Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus mendorong berbagai kegiatan ilmiah seperti olimpiade sains dan matematika mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Bahkan, sekolah dan madrasah juga terus didorong agar siswa berprestasi dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade sains dan matematika di tingkat internasional.

Pada saat yang sama pendidikan anak usia dini (PAUD) juga terus dilakukan untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia

secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD agar partisipasi pendidikan anak usia dini dapat menjadi lebih baik lagi.

Berbagai upaya telah pula dilakukan untuk memperbaiki manajemen pendidikan melalui penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan sampai dengan tingkat satuan pendidikan antara lain dengan memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah berkaitan dengan proses pembelajaran dan penggunaan sumber daya yang ada untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dilaksanakan di seluruh daerah. Penerapan MBS tersebut dengan melibatkan komite sekolah, dan penguatan dewan pendidikan di setiap daerah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan menciptakan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun untuk mencapai 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Walaupun berbagai upaya pembangunan pendidikan terus dilakukan dan ditingkatkan, disadari bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka penyediaan layanan pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan walaupun berbagai upaya terus-menerus dilakukan, tetapi layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau sehingga belum semua penduduk usia sekolah dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik. Pada jenjang SMP/MTs/sederajat, juga masih terdapat selisih capaian angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs/sederajat antara sasaran tahun 2009 (98,0%) dengan capaian terakhir pada tahun 2007 (92,52%). Kendala geografis dan kondisi ekonomi masyarakat juga merupakan faktor

fundamental munculnya kesenjangan partisipasi pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan partisipasi pendidikan, baik antarkelompok masyarakat (kaya-miskin) maupun antarkategori wilayah (perdesaan-perkotaan) meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok umur dan jenjang pendidikan.

Akibat adanya kesenjangan partisipasi pendidikan yang disebabkan faktor ekonomis dan geografis tersebut, diperkirakan ada daerah yang tidak dapat mencapai sasaran APK SMP/MTs/sederajat sebesar 95,0% pada tahun 2008. Di sisi lain, untuk daerah-daerah yang meskipun secara persentase telah mencapai sasaran, secara absolut masih terdapat anak usia 7—15 tahun yang tidak bersekolah sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran nasional.

Masalah penting lainnya adalah angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. Meskipun pemerintah terus menyediakan BOS, menyediakan beasiswa bagi siswa miskin, dan membangun sarana dan prasarana pendidikan, belum seluruh anak usia 7—15 tahun bersekolah sehingga pada tahun 2006 masih ada sekitar 1,4% anak yang tidak/belum sekolah. Pada tahun yang sama, angka putus sekolah atau *drop out* serta tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih tercatat sekitar 5,6%.

Partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah juga masih relatif rendah yang ditandai dengan adanya selisih APK antara sasaran tahun 2009 (69,34%) dan capaian terakhir pada tahun 2007 (60,51%). Fasilitas layanan pendidikan menengah yang belum merata merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang ini, di samping faktor ekonomi yang menyebabkan banyak lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Disadari bahwa anak usia 16—18, terutama pada kelompok miskin sudah banyak dituntut untuk membantu perekonomian keluarga sehingga cukup banyak dari mereka yang lebih memilih bekerja dibanding melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Permasalahan partisipasi juga dihadapi pada jenjang pendidikan tinggi. Sampai dengan tahun 2007 APK pada jenjang pendidikan tinggi telah mencapai 17,25%. Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi pendidikan tinggi antara lain adalah

tingginya biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sehingga sebagian besar masyarakat, terlebih masyarakat miskin, tidak dapat mengakses jenjang pendidikan tinggi. Tidak mengherankan jika kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antara penduduk kaya dan miskin menjadi sangat lebar. Keberadaan perguruan tinggi juga masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga akses masyarakat pada jenjang pendidikan juga menjadi lebih terbatas.

Upaya memperluas jangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) juga terus dilanjutkan, terutama untuk mendorong tumbuh kembang secara optimal dan menyiapkan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Namun, belum seluruh anak usia dini dapat tertampung di berbagai jenis satuan PAUD. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan PAUD. Pada tahun 2007 tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) masih sekitar 48,32% dengan kesenjangan yang cukup tinggi antara wilayah perdesaan dan perkotaan, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, dan antardaerah.

Hal yang sama terjadi dalam upaya perbaikan tingkat keaksaraan penduduk, khususnya yang berusia 15 tahun ke atas. RPJMN 2004—2009 mentargetkan pencapaian angka buta aksara penduduk 15 tahun ke atas menjadi 5% pada akhir tahun 2009. Pencapaian tahun 2007 baru sebesar 7,20%. Meskipun secara persentase selisih antara sasaran RPJMN dan capaian tersebut telah makin kecil, masih dibutuhkan upaya lebih besar dan strategis karena buta aksara lebih banyak terjadi pada penduduk usia 45 tahun ke atas, yaitu sebesar 21% (Susenas 2006), yang pada umumnya memiliki minat yang lebih rendah untuk mengikuti pendidikan keaksaraan.

Pada saat yang sama minat baca masyarakat masih rendah yang antara lain disebabkan oleh ketersediaan sumber bacaan yang masih terbatas. Jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat juga masih sangat sedikit dan belum sampai ke wilayah-wilayah perdesaan. Peran perpustakaan juga belum optimal yang antara lain disebabkan oleh koleksi bacaan yang sedikit, kurang beragam, dan

belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat, serta kualitas tenaga pengelola yang belum baik.

Upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui jalur nonformal dirasakan belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat. Padahal jalur pendidikan nonformal mempunyai fungsi penting untuk memfasilitasi warga belajar memasuki dunia kerja, sekaligus merupakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Pada saat yang sama kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih rendah. Di lain pihak, layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga lulusan yang terserap oleh lapangan pekerjaan belum maksimal.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan perlu ditingkatkan karena lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan yang berkompeten. Beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan mutu dan relevansi, antara lain, (1) ketersediaan pendidik berkualitas belum memadai dan persebaran pendidik belum merata, (2) kesejahteraan pendidik masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum mencukupi, dan (4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan belum memadai.

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, ketersediaan pendidik yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi serta pendistribusian yang relatif merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Namun, dengan merujuk pada data Depdiknas tahun 2006 tampak masih sedikit guru (35,6%) yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-4 seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Meskipun angka tersebut membaik menjadi 41,7% pada tahun 2007, jumlah tersebut belum sepenuhnya mencukupi untuk terjadinya proses belajar mengajar yang bermutu. Umumnya tenaga pendidik pada jenjang SD/MI adalah berpendidikan Diploma 1-3, bahkan ada pula yang hanya lulusan

pendidikan menengah seperti sekolah pendidikan guru, pendidikan guru agama, sekolah guru olahraga, dan SMA.

Permasalahan lain yang menyangkut tenaga pendidik dan kependidikan adalah persebarannya yang tidak merata walaupun secara kuantitatif jumlah guru sudah cukup memadai. Hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan guru di sebagian sekolah, terutama pada sekolah-sekolah di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau. Sebaliknya, terjadi kelebihan guru di sebagian sekolah lainnya, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus dalam meningkatkan komitmen dan kesejahteran guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ketersediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dalam rangka menunjang terjadinya proses belajar mengajar yang kondusif juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Belum semua satuan pendidikan memiliki fasilitas pendukung pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan peralatan peraga pendidikan, disamping masih banyaknya gedung sekolah yang rusak. Sampai dengan tahun 2007, rehabilitasi dan revitalisasi gedung SD/MI dan SMP/MTs masih belum dapat dituntaskan.

Faktor penting lainnya yang juga berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan adalah ketersediaan buku bagi siswa mengingat buku merupakan elemen yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Aksesibilitas buku pelajaran dinilai masih kurang karena harganya yang relatif mahal dan masih terdapat sekolah-sekolah yang melakukan penggantian buku pelajaran hampir setiap tahun ajaran baru.

Masalah lainnya berkaitan dengan elemen peningkatan kualitas pembelajaran adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana penyedia bahan ajar dan sebagai penunjang proses belajar mengajar baik oleh guru maupun siswa, terutama di sekolah pada daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan.

Pembangunan pendidikan juga masih menghadapi masalah, yaitu belum mantapnya koordinasi antara pendidikan formal dan nonformal yang ditandai antara lain dengan format dan kualitas pendidikan nonformal yang belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Fasilitas pelayanan pendidikan formal yang sudah lebih baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Pada jenjang pendidikan tinggi (PT), pelaksanaan PT BHMN belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih adanya kendala hukum dalam operasionalisasinya, baik dalam kerangka pengelolaan keuangan maupun dalam mengelola sumber daya lainnya. Untuk pendidikan tinggi agama, di antaranya mengalami perubahan status menjadi universitas. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat struktur kelembagaan pendidikan tinggi agama. Perubahan ini perlu disertai dengan upaya penataan *software* seperti desain program dan orientasi pengembangan pendidikan tinggi Islam, serta penyediaan pendidiknya, agar perubahan status ini tidak kontraproduktif. Namun, upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi agama juga masih menemui kendala, terutama mengenai masalah manajemen perguruan tinggi agama yang belum sepenuhnya profesional serta kurang efektif dan efisien. Bahkan prasarana, sarana, dan fasilitas pendidikan juga belum memadai sehingga kurang mendukung upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pada saat yang sama pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas. Proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami hambatan karena masih terbatasnya buku teks dan jurnal internasional yang dapat diakses. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual. Permasalahan lain yang berkaitan dengan hasil penelitian PT adalah belum maksimalnya pelaksanaan

diseminasi sehingga akses dan informasi masyarakat serta dunia usaha dalam memanfaatkan hasil penelitian PT belum optimal.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan yang telah memasuki tahun kedelapan menunjukkan belum terciptanya manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien seperti yang diharapkan. Belum mantapnya pelaksanaan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi salah satu penyebab. Selain itu, kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan juga belum memadai. Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) oleh setiap pemerintah kabupaten/kota, serta belum optimalnya peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dalam pembangunan pendidikan, menjadi penyebab lainnya. Namun, diharapkan, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mampu memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing jenjang pemerintah dalam pembangunan pendidikan.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Secara umum langkah kebijakan pembangunan pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), termasuk BOS Buku, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD/MI dan SMP-MTs, pembangunan sarana dan prasarana secara massal, fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD/SMP dan MI/MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil.
2. Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkan kualitas pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan standar

kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui sertifikasi secara massal, serta peningkatan kesejahteraan guru.

3. Meningkatkan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan menengah seluas-luasnya, baik melalui jalur formal maupun nonfomal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.

4. Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, untuk membangun daya saing nasional yang didukung dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.

5. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional untuk menjangkau yang tak terjangkau *(reaching the unreached)*, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (*literate society*).

6. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak (*software*) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi.

7. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan perawatan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor pembangunan terkait dan peningkatan peranserta masyarakat.

8. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip *good governance* yang

mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan termasuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara massal untuk pembelajaran elektronik *(e-learning)* dan e-administrasi. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk *block grant* atau *matching grant* dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

9. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

A. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan

Berbagai indikator menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pembangunan pendidikan nasional mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Data Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2007 mengungkapkan bahwa angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI dan yang sederajat masing-masing telah mencapai 94,90%, sedangkan APK pada jenjang SMP/MTs dan yang sederajat telah mencapai 92,52% serta SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C masing-masing telah mencapai 60,51%. APK pada jenjang perguruan tinggi (PT) yang mencakup pula peguruan tinggi agama (PTA), universitas terbuka (UT), dan pendidikan kedinasan telah mencapai 17,25% (Depdiknas 2007) (Tabel 1). Diharapkan pada tahun 2008 APK untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat meningkat menjadi 95,0% untuk jenjang SMP/MTs/sederajat, 64,2% untuk jenjang pendidikan menengah, dan 18,5% untuk jenjang pendidikan tinggi.

Tabel 27.1
Capaian Kinerja Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan

No.	Indikator Kunci Sukses	Kondisi Awal (2004)	Realisasi 2005	Realisasi 2006	2007		Perkiraan 2008
					Target	Realisasi	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	39,09%	42.34%	45,63%	48.07%	48.32%	50.47%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD /MI/SDLB/Paket A	94.12%	94.30%	94.73%	94.66%	94.90%	95,00%
3	APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	81.22%	85.22%	88.68%	91.75%	92.52%	95.00%
4	APK SMA/SMK/MA/ SMA LB/Paket C	48.25%	52.20%	56.22%	60.20%	60.51%	64.20%
5	APK PT/PTA, termasuk UT	14.62%	15.00%	16.70%	16.38%	17.25%	18,5%
6	Prosentase Buta Aksara > 15 th	10.21%	9.55%	8.075%	7.33%	7.2%	6.22%

Sumber : Depdiknas Tahun 2007

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) juga terus ditingkatan yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak usia dini agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta untuk mendukung kesiapan mereka menempuh pendidikan di SD/MI. Berbagai upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan PAUD telah berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) PAUD menjadi 48,32% pada tahun 2007 dan diharapkan meningkat lagi menjadi 50,47 pada tahun 2008. Peningkatan angka partisipasi ini juga diikuti dengan penurunan disparitas APK PAUD antara kabupaten dan kota menjadi 4,2 pada tahun 2007 dari 4,37% pada tahun 2006.

Upaya perluasan dan pemerataan pelayanan serta peningkatan kualitas PAUD pada tahun 2008 dilakukan antara lain melalui

kegiatan pembangunan 596 taman kanak-kanak/*raudatul athfal* (TK/RA) pembina di tingkat kecamatan yang tersebar di 33 provinsi, pengembangan TK/SD satu atap di 230 sekolah, pemberian subsidi rintisan PAUD untuk 4.264 lembaga, pemberian subsidi lembaga PAUD yang telah berjalan untuk 4.186 lembaga, pengembangan 13 lembaga pusat unggulan PAUD tingkat provinsi dan 26 lembaga di tingkat kabupaten/kota, serta 176 balai pengembangan kegiatan belajar (BPKB) dan sanggar kegiatan belajar (SKB) sebagai pusat percontohan PAUD. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD, telah dilakukan pula pendidikan dan pelatihan bagi 17,2 ribu pendidik dan pengelola PAUD, lomba dan publikasi program PAUD di 87 lokasi, pengembangan materi bahan ajar, dan penyediaan 1.300 set peralatan pendidikan PAUD atau alat permainan edukatif (APE), serta pengembangan manajemen PAUD di 133 lokasi. Dalam rangka perluasan pelayanan PAUD, Departemen Agama pada tahun 2008 juga melakukan berbagai kegiatan di antaranya berupa pemberian subsidi pelaksanaan PAUD, pengadaan alat pendidikan, serta pengembangan manajemen TKA/TPQ dan RA/BA/TA. Kesadaran akan pentingnya pengembangan anak usia dini dalam pengembangan potensi diri secara optimal juga mendapat respons dan dukungan masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan anak usia dini. Dengan bersinergi dengan sektor swasta dan sejumlah organisasi kemasyarakatan pemerintah banyak terbantu dalam upaya perluasan layanan pengembangan PAUD di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya akses, pemerataan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD, partisipasi pendidikan anak usia dini dapat menjadi lebih baik lagi.

Pada jenjang SD/MI angka partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A dan yang sederajat telah mencapai 94,90% pada tahun 2007, meningkat dibandingkan tahun 2006 dan tahun 2005 yang masing-masing baru mencapai 94,48% dan 94,30%. Peningkatan APM untuk jenjang SD/MI yang relatif kecil itu dikarenakan populasi anak usia SD/MI yang tidak bersekolah semakin sedikit. Sebagian di antara mereka adalah kelompok anak yang secara fisik, sosial, budaya, dan geografis memang sulit untuk dijangkau oleh layanan pendidikan, seperti penyandang cacat, anak dari keluarga sangat miskin, dan anak-anak di daerah terpencil. Oleh

karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menyediakan berbagai macam pelayanan khusus dan pendekatan kreatif melalui berbagai pendidikan alternatif termasuk pelaksanaan pendidikan inklusif untuk menjangkau kelompok ini.

Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B setara SMP dan yang sederajat telah mencapai 92,52% pada tahun 2007, meningkat dibandingkan tahun 2006 dan tahun 2005 yang masing-masing baru mencapai 88,68% dan 85,22%. Dengan laju peningkatan angka partisipasi kasar yang rata-rata per tahun mencapai 3% tersebut, penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tahun 2008 diharapkan akan dapat dicapai yang ditandai dengan capaian APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP dan yang sederajat menjadi 95,0%. Disparitas partisipasi pendidikan antara kabupaten dan kota secara umum juga mengalami penurunan secara signifikan, yaitu dari 25,14% pada tahun 2005, menjadi 23,44% pada tahun 2006, dan kemudian turun lagi menjadi 23,00% pada tahun 2007.

Dalam rangka mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pemerintah terus melanjutkan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS). Program BOS ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan siswa tidak mampu dan meringankan siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pada tahun 2008 BOS diberikan bagi 41,9 juta siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun, dengan total anggaran Rp 11,9triliun. Jumlah siswa penerima BOS pada tahun 2008 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencakup 41,3 juta siswa dengan total anggaran sebesar Rp11,6 triliun. Untuk membantu siswa miskin dalam mengakses pendidikan dasar pada tahun 2008 disediakan beasiswa bagi siswa-siswa miskin, dimaksudkan untuk membantu keluarga miskin dalam penyediaan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Jumlah beasiswa yang disediakan pada tahun 2008 menjangkau 1,06 juta siswa jenjang SD/MI dan 679,3 ribu siswa jenjang SMP/MTs.

Berbagai upaya lain untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs juga terus dilakukan. Melalui Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2005 sampai dengan 2007 telah dibangun antara lain 1.356 unit sekolah baru (USB) SMP, 30.341 ruang kelas baru (RKB) SMP serta rehabilitasi ruang kelas sebanyak 217.113 ruang kelas SD, dan 18.501 ruang kelas SMP. Untuk lebih meningkatkan daya tampung SMP, tahun 2008 dilakukan pembangunan 470 USB dan 11.069 RKB. Selain itu, dilakukan pula pembangunan 450 SD-SMP satu atap sebagai upaya peningkatan angka melanjutkan dari SD ke SMP yang difokuskan di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk mengatasi siswa yang rawan putus sekolah, juga dilakukan pemberian bantuan dalam bentuk kelas layanan khusus untuk 25,5 ribu peserta didik. Peningkatan partisipasi jenjang SMP/MTs juga terus dilakukan melalui penyelenggaraan SMP Terbuka.

Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan Tahun yang menjadi tanggung jawab Departemen Agama dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk MI, MTs, dan pondok pesantren. Pada tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan 499 USB MI/MTs, rehabilitasi 2.066 MI, bantuan sarana dan prasarana MI 205 lokasi dan MTs 237 lokasi, dan rehabilitasi 2.000 ruang kelas MTs, pengadaan peralatan pendidikan, pengadaan buku perpustakaan dan buku pelajaran lainnya, pembangunan MI-MTs satu atap, serta rehabilitasi sarana pendidikan pascabencana serta bantuan sarana prasarana MI dan MTs yang ada di daerah terpencil.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada jenjang pendidikan dasar, pada tahun 2008 juga dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi 99,4 ribu ruang ruang kelas SD/MI di sekitar 33,1 ribu sekolah. Pada saat yang sama disediakan pula anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp7,015 triliun pada tahun 2008.

Di samping dilakukan melalui jalur formal, upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun juga dilakukan melalui jalur nonformal dengan menyelengarakan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B, termasuk yang diselenggarakan di pondok pesantren. Penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal ditujukan untuk melayani masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan

formal karena berbagai keterbatasan. Jumlah peserta program paket A pada tahun 2005 sebanyak 82,9 ribu peserta didik, tahun 2006 sebanyak 100 ribu peserta didik, tahun 2007 sebanyak 102,3 ribu peserta didik dan pada tahun 2008 sebanyak 108,7 ribu peserta didik. Peserta program Paket B lebih banyak lagi, yaitu 416,6 ribu, 503,9 ribu, 569,7 ribu dan 499.9 ribu peserta didik pada periode yang sama.

Pada jenjang pendidikan menengah, angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C mengalami peningkatan dari 52,20% pada tahun 2005 menjadi 56,22% pada tahun 2006, dan kemudian menjadi 60,51% pada tahun 2007. Angka tersebut diharapkan meningkat menjadi 64,2% pada tahun 2008. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan menengah semakin tinggi. Hal itu didukung dengan penurunan disparitas angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/SMA LB antara kabupaten dan kota yang turun dari 33,13% pada tahun 2005 menjadi 31,44% pada tahun 2006 dan turun menjadi 31,20% pada tahun 2007. Meskipun menurun, disparitas tersebut masih cukup tinggi sehingga Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama perlu bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara umum di kabupaten guna meningkatkan pelayanan pendidikan di kawasan perdesaan.

Berbagai upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 antara lain dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan 212 USB SMA dan 251 USB SMK serta pembangunan 6.035 RKB SMA dan 2,267RKB SMK. Untuk tahun 2008 penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan antara lain melalui pembangunan 10 USB SMA dan 215 USB SMK, serta pembangunan 763 RKB SMA dan 4.651 RKB SMK. Pembangunan USB dan RKB tersebut akan dilaksanakan melalui pemberian imbal swadaya (*matching grant*) yang mekanisme pembangunannya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan anggota masyarakat. Pada tahun 2008 Departemen Agama juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan menengah termasuk melalui pembangunan 120 USB MA.

Untuk mendukung upaya peningkatan paratisipasi pendidikan menengah khususnya untuk masyarakat miskin, pada tahun 2008 juga disediakan beasiswa bagi siswa miskin sebanyak 930,8 ribu siswa jenjang SMA/SMK/MA. Penyediaan beasiswa ini diharapkan dapat membantu orang tua untuk lebih mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMA/SMK/MA.

Untuk mendukung jalur pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan menengah melalui jalur nonformal juga terus dilakukan. Pada tahun 2008 penyelenggaraan program Paket C terus dilakukan dengan sasaran 34,2 ribu peserta didik dengan kegiatan antara lain penyediaan biaya operasional pendidikan dan penyediaan bahan ajar Paket C.

Perluasan dan pemerataan pelayanan jenjang pendidikan tinggi terus pula dilakukan. Selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 melalui Departemen Pendidikan Nasional dilakukan pendirian 5 politeknik negeri baru, dan pembangunan 86,7 ribu m2 gedung kuliah. Upaya perluasan dan pemerataan pelayanan jenjang pendidikan tinggi juga dilakukan oleh Departemen Agama dengan meningkatkan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi agama antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk UIN, IAIN dan STAIN. Pada tahun 2007 dan 2008 juga dilakukan kegiatan pengembangan UIN bertaraf internasional, dan pengembangan perguruan tinggi agama (PTA) melalui rehabilitasi sarana prasarana, pengembangan Ma’had Aly, pembangunan laboratorium, penyediaan biaya operasional, pemberian bantuan pengembangan PTA swasta, serta pengembangan kerja sama internasional.

Peningkatan daya tampung perguruan tinggi dan sekaligus pengembangan program studi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah terus dilakukan secara terkendali. Perluasan daya tampung ini tidak semata-mata untuk menambah jumlah mahasiswa tetapi untuk memberikan layanan kebutuhan pendidikan tinggi yang berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemberian beasiswa untuk mahasiswa miskin juga terus dilakukan. Pada tahun 2008 beasiswa diberikan bagi 214,0 ribu mahasiswa PT/PTA. Melalui Departemen Agama bahkan khusus

kepada santri miskin yang berprestasi juga diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi terkemuka seperti IPB, ITB, UNAIR, ITS, UGM, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Surabaya dan IAIN Semarang. Pada tahun 2008 beasiswa ini diberikan kepada 1.100 santri.

Untuk peningkatan mutu pendidikan melalui Departemen Pendidikan Nasional dilakukan pembangunan 19,8 ribu m^2 laboratorium baru, pembangunan 15 perpustakaan perguruan tinggi, pengadaan buku perpustakaan, jurnal ilmiah, serta pengadaan peralatan pendidikan. Pada saat yang sama Departemen Agama juga melakukan kegiatan sejenis untuk perguruan tinggi agama.

Tingkat keaksaraan penduduk Indonesia juga terus membaik yang ditandai dengan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2007 mencapai 7,2%. Angka tersebut menurun dari 9,55% pada tahun 2005 dan 8,07% pada tahun 2006. Pada tahun 2008 angka ini diharapkan menurun lagi menjadi 6,22%. Agar angka buta aksara ini dapat diturunkan lebih baik lagi menjadi 5% pada tahun 2009 sebagaimana target RPJMN 2004—2009, berbagai upaya yang lebih besar dan strategis tetap diperlukan. Salah satu kendala penurunan ini adalah masih banyaknya penduduk buta aksara yang berusia 45 tahun ke atas. Mereka pada umumnya memiliki minat lebih rendah untuk mengikuti pendidikan keaksaraan dibandingkan dengan yang berusia lebih muda. Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat menurunkan angka buta aksara penduduk dilakukan melalui pendidikan keaksaraan fungsional. Dalam tahun 2005 sampai dengan 2007 pendidikan keaksaraan fungsional diikuti oleh 3,7 juta peserta didik. Kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional ini akan terus ditingkatkan pelaksanaannya dan pada tahun 2008 akan diikuti 739,1 ribu peserta didik. Melalui penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang terus dilakukan dan didukung oleh upaya menurunkan angka putus sekolah di kelas-kelas awal SD/MI diharapkan penduduk buta aksara baru dapat berkurang secara signifikan.

Upaya peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk dilakukan pula dengan menumbuhkan budaya baca di kalangan masyarakat. Untuk mendukung upaya ini dilakukan antara lain pendirian taman bacaan masyarakat (TBM) serta pemberian subsidi

bagi lembaga penyelenggaraan TBM. Pemberian subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan TBM sejalan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2007 telah dilakukan pengadaan 127 TBM layanan khusus (*mobile* TBM) untuk memberikan layanan di daerah perdesaan yang jauh dari TBM dan perpustakaan, yang penyalurannya dilakukan melalui sanggar kegiatan belajar (SKB). Lebih lanjut pada tahun 2008 diberikan pula bantuan bagi 722 lembaga penyelenggara TBM dan pemberian bantuan 50 buah mobil perpustakaan keliling sebagai stimulan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan juga telah dilakukan berbagai kegiatan di antaranya, adalah (1) penyelenggaraan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan *e-library* di perpustakaan provinsi dan perpustakaan umum kabupaten/kota, (2) sosialisasi dan kampanye perpustakaan dan gemar membaca melalui berbagai media, (3) penyusunan standar dan pedoman untuk berbagai jenis perpustakaan sebagai tindak lanjut UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; (4) penggalakan pengelolaan *International Standard Book Number* (ISBN), dan *International Standar Music Number* (ISMN), penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI), Katalog Induk Nasional (KIN), dan penerbitan literatur sekunder lainnya; (5) pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam; serta (6) diseminasi bahan bacaan kepada perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, desa, sekolah, rumah ibadah, dan pondok pesantren;

Melalui program pendidikan nonformal pada tahun 2008 diberikan pula subsidi pendidikan kecakapan hidup (PKH) bagi 337 lembaga dan 94,0 ribu orang yang putus sekolah jenjang pendidikan menengah dan lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan yang berusia produktif dan belum bekerja karena tidak memiliki keterampilan fungsional. Kegiatan pembelajaran diarahkan pada peningkatan kecakapan vokasi, akademik, personal dan sosial, dan bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Kegiatan kursus dan magang juga terus dilakukan.

B. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang terus ditingkatkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, s pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi akademik pendidik, penyediaan fasilitas pendidikan berupa ruang laboratorium, perpustakaan, pusat sumber belajar, beserta peralatan peraga pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi serta distribusi yang relatif merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan bahwa guru pada semua jenjang pendidikan dari TK/RA/BA sampai SMA/SMK/MA harus memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-4. Sampai tahun 2007 guru yang memenuhi kualifikasi S-1/ D-4 telah mencapai 41,7%. Pada saat yang sama guru yang bersertifikat pendidik telah mencapai 5,88%. Untuk meningkatkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik, pada tahun 2008 dilakukan pendidikan jenjang S1/DIV bagi lebih dari 201,0 ribu ribu orang guru. Sementara itu, uji sertifikasi profesi guru pada tahun yang sama direncanakan menjangkau paling sedikit 265,4 ribu orang.

Pada tahun 2008 Pemerintah juga terus meningkatkan kesejahteraan pendidik dengan menyediakan tunjangan fungsional bagi 1,9 juta guru pegawai negeri sipil (PNS), 807,75 ribu guru non-PNS, tunjangan profesi bagi 135,1 ribu guru, dan tunjangan khusus bagi 20,9 ribu guru yang bekerja di darah terpencil. Dengan meningkatnya kualitas dan kesejahteraan guru, diharapkan kualitas proses pembelajaran di sekolah juga dapat ditingkatkan.

Upaya pembinaan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pendidik dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan/pelatihan gelar maupun non gelar termasuk menghidupkan kelompok kerja guru (KKG) dan kelompok kerja

kepala sekolah (MKKS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di 440 kabupaten/kota dan 5.277 kecamatan di seluruh Indonesia.

Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 juga dilakukan melalui pembangunan 464 perpustakaan SD dan 2.230 perpustakaan SMP, pengadaan 41,2 juta buku teks untuk perpustakaan SD/SMP, pembangunan 5.260 laboratoriun IPA SD/SMP dan pembangunan 1.001 laboratorium bahasa/multimedia SD/SMP serta pembangunan 2.320 laboratorium komputer SD/SMP. Pada tahun 2008 kegiatan yang sama akan dilakukan pula dengan sasaran pembangunan 6,4 ribu ruang pusat sumber belajar SD dan 3,5 ribu ruang pusat sumber belajar SMP, pembangunan 3,75 ruang laboratorium IPA dan perpustakaan SMP, serta penerapan TIK jenjang pendidikan dasar di 2,2 ribu sekolah.

Pada tahun 2007 juga telah dikembangkan sekolah rintisan SD/MI dan SMP/MTs yang bertaraf internasional di 141 SD dan 170 SMP yang bertaraf internasional. Untuk tahun 2008 akan dirintis 66 SD/MI dan 400 SMP/MTs bertaraf internasional. Melalui Departemen Agama pada tahun 2008 telah dilakukan, antara lain, pembangunan 1.000 ruang laboratorium di MI/MTs, perintisan 10 MTs unggulan berstandar internasional, dan pemberian bantuan peningkatan mutu madrasah 480 MI dan 260 MTs. Pada tahun 2008 Pemerintah juga terus menyediakan BOS Buku terutama adalah untuk mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Indonesia sebanyak 19,1 juta eksemplar dengan dana Rp420 miliar.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan menengah pada tahun 2008 dilaksanakan pembangunan 35 pusat sumber belajar SMA, rehabilitasi 1.200 ruang kelas SMK, pembangunan 200 ruang perpustakaan, laboratorium SMK serta penerapan TIK jenjang menengah di 1.576 SMA/SMK. Selain itu dilakukan pula perintisan 259 SMA bertaraf internasional dan perintisan 100 SMA berbasis keunggulan lokal serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah/madrasah negeri dan swasta bagi SMA. Pada tahun 2008 BOMM diberikan kepada 1.063 SMA. Pada saat yang sama melalui Departemen Agama telah dilakukan pula rehabilitasi 2.500 ruang kelas MA, pembangunan unit sekolah baru MA 100 unit,

pengembangan pendidikan keterampilan pada 60 lokasi, pembangunan 1.000 ruang laboratorium dan perpustakaan MA, pengembangan 10 MA unggulan berstandar internasional, dan penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah bagi 120 MA.

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan kejuruan memasuki pasar kerja dilakukan perintisan 179 SMK bertaraf internasional, perintisan 317 SMK berbasis keunggulan lokal, serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk siswa SMK. Pada tahun 2008 BOMM diberikan kepada 2,79 juta siswa SMK.

Untuk pelaksanaan standar nasional pendidikan, telah dilakukan ujian nasional (UN) bagi siswa SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2007/2008 dengan penetapan batas nilai kelulusan di atas 5,25. Kenaikan batas nilai kelulusan ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Kenaikan batas nilai kelulusan ini sudah terlampaui dengan adanya rerata hasil UN SMP/MTS yaitu 6,87 pada tahun 2008 dan rerata hasil UN SMA/SMK/MA, yaitu 7,17 pada tahun 2008. Pada jenjang SD/MI mulai tahun 2008 telah dilakukan juga ujian sekolah berstandar nasional (USBN) yang diikuti oleh 5,1 juta siswa kelas VI SD/MI.

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah juga terus mendorong sekolah/madrasah dan siswa berprestasi untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade dan kompetisi tingkat internasional. Dari berbagai keikutsertaan di berbagai olimpiade dan ajang kompetisi internasional pada semua jenjang pendidikan, pada tahun 2007 kontingen Indoensia memperoleh 51 medali, jauh melampaui target tahun 2007 yang hanya menargetkan sebanyak 19 medali. Pencapaian prestasi yang menggembirakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki banyak generasi muda yang cerdas, berbakat, dan potensial. Dengan jumlah pelajar berprestasi dalam berbagai forum kompetisi internasional yang relatif banyak, kita boleh bersikap optimistis bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan daya saing tinggi untuk masuk dalam persaingan global. Pelajar-pelajar Indonesia yang unggul telah memberi kontribusi besar dalam mengharumkan nama bangsa yang

pada akhirnya nanti dapat berperan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya peningkatan mutu pendidikan juga terus dilakukan dengan penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen dengan melakukan peningkatan kualitas pengelolaan akreditasi program studi, peningkatan kinerja proses akreditasi, serta peningkatan kesiapan perguruan tinggi yang membutuhkan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi. Selain itu, dilaksanakan penelitian hibah bersaing, pemberian *block grant* penelitian pada beberapa perguruan tinggi, serta kerja sama penelitian antarperguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Pada tahun 2008 terdapat 9.992 judul produk penelitian di PT yang menghasilkan paten, teknologi tepat guna, rekayasa sosial karya seni, dan bahan ajar oleh perguruan tinggi.

Hal yang menggembirakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia adalah bahwa pada tahun 2007 terdapat 6 perguruan tinggi Indonesia yang berhasil masuk dalam kelompok 500 universitas terbaik versi *Times Higher Education Supplement* (THES). Keenam universitas tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (peringkat 360), Institut Teknologi Bandung (peringkat 369), Universitas Indonesia (peringkat 395), Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, dan Institut Pertanian Bogor (peringkat 401-500). Status UT dengan 47 program studi berakreditasi *International Council for Open and Distance Education* (ICDE) masih tetap berlaku pada tahun 2007 sehingga dalam kurun tahun 2007 pendidikan tinggi di Indonesia dengan 858 program studi telah berhasil masuk peringkat 500 besar dunia atau berakreditasi ICDE.

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memperoleh sertifikat atau bentuk pengakuan berkelas dunia, antara lain ISO/IEC 17025:2005 untuk laboratorium penelitian dan pengujian terpadu (LPPT) di UGM; sertifikat pengakuan dari *United Nations University* kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *Regional Center of Expertise in Education for Sustainable Development*, UGM; sertifikat untuk *Institute for Human Virology and Cancer Biology* (IHVCB), Fakultas Kedokteran UI, dengan klasifikasi *Bio Safety* III (BS-III) oleh *American Biohazard*; sertifikat

pengakuan dari *United Nation University* kepada SEAMEO Biotrop sebagai *Regional Center of Expertise in Education for Sustainable Development*; sertifikat *Approved Training Body* dari *International Institute of Welding* (IIW) kepada Politeknik Negeri Bandung; Sertifikat ISO/IEC 17025:2005 untuk Laboratorium Uji Mutu Produk-Produk Pangan, P4TK Pertanian Cianjur; dan sertifikat dari *International Maritime Organization* (IMO) untuk *Semarang Growth Center*.

Upaya meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan nonformal antara lain ditempuh melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, magang, kursus, orientasi teknis dan bimbingan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya bagi penguatan kualitas program pendidikann nonformal.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal juga telah dilakukan peningkatan kemampuan fungsional pengelola PKBM, baik yang dilakukan melalui lembaga PKBM maupun pembinaan tutor. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada pendidikan nonformal, Pemerintah telah berhasil meningkatkan mutu pada lembaga-lembaga kursus sehingga mampu memberikan sertifikat bertaraf internasional untuk keterampilan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, komputer, tata kecantikan kulit dan rambut, akupunktur, terapis-spa, tata rias pengantin, dan merangkai bunga.

Peningkatan relevansi pendidikan secara umum telah memberikan hasil yang cukup memuaskan yang ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya rasio jumlah siswa SMK terhadap siswa SMA dari 44:56 pada tahun 2007 menjadi 38:62 pada tahun 2008; (2) meningkatnya APK pendidikan tinggi vokasi (D2/D3/D4/politeknik) yang telah mencapai 3,86% pada tahun 2007; (3) rasio jumlah mahasiswa profesi terhadap jumlah lulusan S1/D4 pada tahun 2007 adalah sebesar 78,22%; (4) persentase peserta pendidikan kecakapan hidup terhadap lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan pada tahun 2007 mencapai 12,5%; (5) sampai tahun 2007, jumlah sertifikasi pendidik yang diterbitkan adalah (a) pendidikan menengah sebesar 625.000; (b) pendidikan tinggi (vokasi dan profesi) sebesar 162.262; (c) pendidikan nonformal sebesar 42.117.

C. Peningkatan Manajemen, Tata Kelola, dan Akuntabilitas Pelayanan Pendidikan

Sampai dengan pertengahan tahun 2008 telah dilakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan nasional guna meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelayanan pendidikan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan ini penting untuk memantapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur, dan antarjenis pendidikan.

Dalam rangka memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah berkaitan dengan proses pembelajaran dan penggunaan sumber daya yang ada untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan pendidikan, telah dilakukan penerapan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS). Pada tahun 2008 upaya agar MBS dapat diterapkan di seluruh daerah terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

Penerapan paradigma baru pendidikan tinggi terus dimantapkan melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada perguruan tinggi dalam merencanakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab dan terkendali berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan penerapan mekanisme perencanaan program dan penganggaran terpadu melalui mekanisme *block grant* berdasarkan kompetisi berjenjang (*competitive-based funding mechanism*) yang mengacu pada kualitas (*merit-based tiered competition*) yang didahului dengan evaluasi diri secara berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen perguruan tinggi, terutama unit akademik dasar. Hal ini telah mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan keluaran yang sebanding dengan pembiayaan yang diterimanya.

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya pendidikan secara terpadu dan efisien dilakukan kerja sama antarperguruan tinggi, antara perguruan tinggi

dan pemerintah daerah, dan antara perguruan tinggi dan lembaga lain.

Dalam meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan nasional di lingkungan Depdiknas, diterapkan sertifikasi ISO 9001:2000. Pada akhir tahun 2009 diharapkan setidaknya 80% dari seluruh unit kerja dapat memperoleh sertifikat ISO 9001:2000. Untuk bidang perencanaan, telah dilakukan upaya pemantapan dengan sistem perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program dengan mengacu pada Permendiknas No. 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional, serta dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi program dengan satuan-satuan kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kordinasi Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007. Untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan di Departemen Agama, pada tahun 2007 juga telah dilakukan berbagai upaya di antaranya pengembangan *education management information system* (EMIS), pendataan dan pemetaan pendidikan agama dan keagamaan, pengembagan ICT bagi pengelolaan pendidikan, serta pembinaan manajemen berbasis madrasah (MBM).

Dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Departemen Pendidikan Nasional mulai menerapkan TIK secara besar-besaran untuk e-pembelajaran dan e-administrasi, yang ditandai dengan dioperasikannya Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas). Jejaring ini pada akhirnya diharapkan mampu menghubungkan semua satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan semua kantor pemerintahan yang menangani bidang pendidikan baik di pusat maupun di daerah. Hingga akhir tahun 2007 Jardiknas telah menghubungkan kantor pusat Depdiknas di Jakarta dengan lebih dari 10 ribu sekolah, 82 PTN, 133 PTS, 36 unit pendidikan belajar jarak jauh (UPBJJ) universitas terbuka, 33 dinas pendidikan provinsi, 471 dinas pendidikan kabupaten/kota, 30 lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), 12 pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), 5 balai pengembangan pendidikan luar sekolah dan pemuda

(BPPLSP), 10 sanggar kegiatan belajar (SKB), 22 balai/kantor bahasa, dan 17 balai teknologi komunikasi.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dan hasil yang telah dicapai sampai bulan Juli 2008, diperlukan langkah dan tindak lanjut yang difokuskan pada (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Perluasan akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, wilayah perbatasan dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), termasuk BOS Buku, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, pembangunan sarana dan prasarana secara massal, fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD/SMP dan MI/MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil.
2. Perbaikan distribusi guru dan meningkatkan kualitas pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sertifikasi secara massal, serta peningkatan kesejahteraan guru.
3. Peningkatan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan menengah seluas-luasnya, baik melalui jalur formal maupun nonfomal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.

4. Peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan diiringi dengan peningkatan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian untuk membangun daya saing nasional yang didukung dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.

5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional untuk menjangkau yang tak terjangkau *(reaching the unreached)*, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (*literate society*).

6. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak (*software*) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi.

7. Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan perawatan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peranserta masyarakat.

8. Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan, termasuk penerapan TIK secara massal untuk pembelajaran elektronik *(e-learning)* dan e-administrasi. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk *block grant* atau *matching grant* dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.